

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DPRD KOTA SALATIGA



TENTANG
RAPBD KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2026

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
TERHADAP
RAPBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua

Ykh Walikota Salatiga;

Ykh Wakil Walikota Salatiga;

Ykh Jajaran Forkompinda Kota Salatiga;

Ykh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Salatiga;

Ykh Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Salatiga;

Ykh Para Asisten Sekda dan Staf Ahli Walikota;

Ykh Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Ykh Para Camat dan Lurah se-Kota Salatiga

Ykh Para Hadirin dan Tamu Undangan yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang atas ridho-Nya pada kesempatan yang baik ini masih berkenan melimpahkan berbagai kenikmatan dan kesempatan kepada kita semua.

Sidang Paripurna yang terhormat;

Mengawali pandangan umum fraksi PKS pada kesempatan siang hari ini, kami mencoba untuk memahami kegelisahan yang dialami oleh pemerintah daerah baik itu propinsi maupun kabupaten kota di hampir seluruh wilayah di Indonesia; terkait dengan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD); tidak terkecuali Kota Salatiga.

Pengurangan TKD yang sangat signifikan sebesar lebih dari 140 Miliar untuk Kota Salatiga, membuat kita harus berpikir ekstra keras agar fungsi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terganggu;

Di sektor Pendapatan misalnya; dengan adanya penurunan dana Transfer ke Daerah maka kita harus berpikir keras bagaimana cara meningkatkan PAD sebagai salah satu unsur/ variable penopang Pendapatan Daerah kita;

Pendapatan Asli Daerah yang kita proyeksikan sebesar Rp. 324.861.630.878,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau naik sekitar Rp.3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah) jika dibandingkan dengan Penetapan APBD Tahun 2025 yang lalu ternyata tidak bisa banyak membantu jebloknya pendapatan daerah kita akibat pengurangan Dana TKD;

Sidang Paripurna yang terhormat;

Sementara itu ketika kita bicara terkait Belanja Daerah; ternyata ada komponen-komponen yang tetap harus kita pertahankan seperti belanja pegawai misalnya; yang dari total Belanja Daerah yang kita proyeksikan sebesar Rp. 890.794.061.878,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah); kita masih memasang belanja Pegawai sebesar Rp. 434.849.598.465,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau sekitar 44% total Belanja Daerah; dan perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa jika kita merujuk kepada UU No.1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa; “Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD”; maka angka 44% ini menjadi PR tersendiri bagi kita, apalagi pelaksanaan angka 30% tersebut akan diterapkan di tahun 2027;

Sedangkan Belanja Modal yang kita harapkan bisa menjadi salah satu pemantik pertumbuhan ekonomi kita; di RAPBD 2026 hanya bisa kita pasang sebesar Rp. 59.100.897.867,00 (Lima Puluh Sembilan Miliar Seratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) atau hanya sekitar 6,6% dari total Belanja Daerah kita yang kita proyeksikan sebesar Rp. 890.794.061.878,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah); angka 6,6% jauh dari angka ideal yang semestinya minimal bisa mencapai 20% dari total Belanja Daerah;

Sidang Paripurna yang terhormat;

Terhadap berbagai kondisi keterbatasan anggaran seperti yang kita hadapi saat ini, maka kami dari Fraksi PKS meminta kepada Saudara Walikota untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Fraksi PKS meminta agar keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi halangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat;
2. Dengan pemangkasan dana Transfer ke Daerah, maka Fraksi PKS meminta agar pemerintah kota Salatiga segera berbenah untuk kembali menggali potensi-potensi PAD melalui berbagai upaya yang regulatif tetapi tidak membebani masyarakat; seperti optimalisasi BUMD-BUMD yang kita punya dan upaya-upaya lainnya;

3. Dalam konteks upaya mendapatkan pengganti dana Transfer ke Daerah yang berkurang cukup drastis, maka Fraksi PKS meminta agar pemerintah Kota Salatiga mencoba upaya pendekatan kepada Kementrian dan Lembaga dengan menyiapkan Daftar Usulan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026, meskipun DAK Fisik Nasional Tahun 2026 hanya 5 Triliun dibandingkan Th 2025 36,95 Triliun, hal ini juga pasti mempengaruhi DAK Fisik ke Daerah.
4. Arah kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2026 salah satu Programnya Makan bergizi Gratis dengan Anggaran 335 Triliun dari 70 Triliun di Tahun 2025 tidak mematikan kantin-kantin sekolahan kita yang melibatkan masyarakat, justru bisa berkolaborasi dengan kantin-kantin yang sudah ada. Dalam hal ini kita perlu mencontoh ide dan gagasan Kota Jogja.

Sidang Paripurna yang terhormat;

Selain ketiga hal tersebut di atas, Fraksi PKS agar pemerintah kota Salatiga melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait Permasalahan pengelolaan sampah yang saat ini semakin urgent, maka kami meminta agar pemerintah kota Salatiga di RAPBD tahun 2026; dengan keterbatasan anggaran yang ada tetap harus berupaya untuk bisa mengatasi permasalahan sampah dengan kegiatan-kegiatan yang terukur;
2. Memaksimalkan pemanfaatan aset daerah, pendataan ulang pedagang khususnya pedagang pasar pagi, masih ada ratusan pedagang pasar pagi yang belum bisa membayar e-retribusi, penataan PKL yang memungkinkan menjadi sumber pendapatan dan wisata kuliner untuk meningkatkan PAD.

Sidang Paripurna yang terhormat;

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Kota Salatiga Terhadap RAPBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salatiga, 12 November 2025

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD KOTA SALATIGA

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Nono Rohana, S.Ag | (Ketua) |
| 2. Agus Warsito | (Wakil Ketua) |
| 3. Heru Prastyo, SE, ME | (Sekretaris) |
| 4. Latif Nahari, ST | (Anggota) |

